BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

2.1.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero)

Untuk menyusun sejarah listrik di seluruh Indonesia tidaklah mudah. Penyusunan sejarah listrik yang bermutu hanya memungkinkan apabila ditemukan arsip-arsip Departemen Kehakiman dan Departeman V & W (PUT).

Sebagai gambaran singkat berdasarkan beberapa data yang dapat ditemukan sejarah listrik di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.2 Perusahan Listrik Zaman Hindia Belanda

Menurut berbagai keterangan yang ditemukan menyatakan bahwa cahaya listrik mulai bersinar di wilayah Indonesia pada akhir abad ke-19 pada zaman pemerintah Hindia Belanda.

Pembangunan kelistrikan di wilayah Indonesia terjadi sebagai berikut :

a. Elektrifikasi di wilayah kota Batavia sekitar tahun 1983 merupakan stadsBedrijf Batavia.
b. Elektrifikasi di wilayah kota Medan sekitar tahun 1903 sebagai stadsBedrijf yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama Electricteit Bedrijf Medan (Deli).
c. Elektrifikasi di wilayah kota surabaya kira-kira tahun 1907, merupakan stadsBedrijf yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama Electricteit Bedrijf Surabaya

Tahun-tahun berikutnya menurut keterangan dari berbagai sumber yang kurang jelas kelistrikan antara lain dibangun di Palembang dalam kaitannya dengan usaha pertambangan minyak. Di Ambon dan Makasar untuk kepentingan militer.

Setelah perusahaan listrik yang berpusat di negeri Belanda didirikan di beberapa wilayah Indonesia (umumnya pembangkitan) maka distribusi atau pendistribusian tenaga listrik oleh pemerintah daerah dialihkan kepada perusahaan listrik swasta.

Menurut catatan pendirian perusahaan listrik pada zaman Belanda di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan listrik NV NIGM yang kemudian namanya berubah menjadi NV OGEM.
    a. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 27 Juni 1913 pemberian konsensi untuk melistriki wilayah kota Batavia.
    b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 29 tanggal 1 Nopember 1915, yaitu pemberian konsensi untuk membuka aliran listrik di wilayah kota Jatinegara.
    c. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 14 tanggal 17 Mei 1924, yaitu pemberian konsensi untuk membuka aliran listrik di wilayah kota Tanggerang.
    d. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan bertanggal 6 Nopember 1924, yaitu pemberian konsensi untuk membuka aliran listrik di wilayah kota Cirebon.

e. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 12 tanggal 16 Juni 1927, yaitu pemberian konsensi untuk membuka aliran listrik di luar wilayah kota Cirebon.

Pemberian izin beroperasi kepada NV NIGM di luar P. Jawa antara lain dikeluarkan untuk wilayah kota Medan kemudian secara berturut-turut menyusul wilayah Palembang, Makasar, TanjungKarang (Lampung) dan Manado.

Keterangan yang jelas mengenai izin beroperasi kepada NV NIGM konsesi di luar P. Jawa tidak atau belum ditemukan tetapi menurut berbagai pendapat dan keterangan yang diperoleh untuk wilayah Palembang terjadi sebelum tahun 1920, dan untuk wilayah lainnya terjadi setelah tahun 1920, misalnya Medan, Tanjungkarang, Makasar, Manado dan sebagainya.

2. Perusahaan Listrik NV ANIEM
   a. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 6 tanggal 8 februari 1914 pemberian Konsensi untuk elektrifikasi wilayah Surabaya – Semarang-Yogyakarta.
   b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 25 tanggal 9 Mei 1927 pemberian konsensi untuk elektrifikasi berbagai wilayah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur diluar wilayah yang telah dikelola oleh OGEM, ELECTRA, EMR dan EMB.
   c. Pemberian Izin beroperasi kepada NV ANIEM untuk elektrifikasi wilayah diluar P Jawa anatara lain : Bukit tinggi, Pontianak, Ambon dan sebagainya.
3. Perusahaan Listrik NV GEBEO

Perusahaan listrik NV GEBEO merupakan usaha bersama pemerintah Jawa Barat ikut serta dengan keputusan yang dikeluarkan sebagai berikut :

a. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 24 tanggal 30 Januari 1923 / 1928 pemberian konsensi untuk elektrifikasi wilayah Bandung dan sekitarnya (sebelum lampu gas, listrik oleh militer).
b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 24 tanggal 19 Maret 1923 / 1928 pemberian konsensi untuk kota Bogor dan sekitarnya (sebelum lampu gas).
c. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 24 Desember 1938, No.21 tanggal 20 Mei 1940, No. 30 tanggal 18 januari 1940 pemberian konsensi untuk elektrifikasi wilayah karesidenan dan kabupaten seluruh propinsi jawa barat kecuali Cirebon dan Jakarta yang dikelola oleh NV NIGM.

4. Perusahaan Listrik ELECTRA
   a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik Electra dengan Surat keputusan No. 37 tanggal 7 Juni 1915 pemberian konsensi untuk elektrifikasi wilayah kota Tulung Agung.
   b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 31 tanggal 4 September 1922 dengan surat Keputusan No. 33 tanggal 30 Maret 1927 pemberian konsensi untuk elektrifikasi wilayah luar kota Tulung Agung.

5. Perusahaan Listrik SEM
    a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik SEM dengan Surat Keputusan No. 15 tanggal 21 Desember 1925 pemberian konsensi untuk elektrifikasi wilayah kota Kesultanan Surakarta.
    b. Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat Keputusan No. 8 tanggal 8 Januari 1937 pemberian konsensi untuk elektrifikasi wilayah kabupaten dan sebagainya. Yang termasuk dalam Kesultanan Surakarta.
6. Perusahaan Listrik OJEM

    Izin beroperasi dikeluarkan kepada OJEM dengan Surat Keputusan No 28 tanggal 24 februari 1925, No. 8 tanggal 26 Desember 1925, No. 61 dan No. 62 tanggal 29 Agustus 1927, No. 16 tanggal 8 Juni 1929 untuk melistriki wilayah Karesidenan Panarukan dan beberapa Kabupaten disekitarnya.
7. Berdiri dan beropersinya Perusahaan Listrik EMR
    a. Izin beroperasi dikeluarkan kepada NV. EMR dengan Surat Keputusan No. 12 tanggal 25 Juni 1927 pemberian konsensi untuk elektrifikasi kota Rembang.
    b. Izin beroperasi dikeluarkan kepada NV. EMR dengan surat Keputusan No. 8, No. 9, No. 10 tanggal 4 Maret 1929 untuk menambah konsensinya memperluas elektrifikasi di wilayah Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro.
8. Berdiri dan beroperasinya perusahaan Listrik EMB

9. Izin beroperasinya dikeluarkan NV. EMB dengan Surat Keputusan No. 31 tanggal 27 September 1939 pemberian konsensi untuk Elektrifikasi wilayah Karesidenan Banyumas dan beberapa kabupaten sekitarnya.

2.1.3. Perusahaan Listrik Zaman Jepang

Pada masa Perang Dunia Kedua semua perusahaan listrik diwilayah Indonesia dengan sendirinya berada dibawah pengawasan Tentara Jepang, antara lain perusahaan Listrik Belanda yang berada dibawah Angkatan Darat Jepang dijadikan perusahaan Listrik Jepang dengan nama sebagai berikut :

a. Jawa Denki Jigyokoska Kantor Pusat di jakarta.
b. Seibu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Barat.
c. Chobu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Tengah.
d. Tebu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Timur.
e. Cabang-cabang perusahaan listrik tetap seperti semula.

Dengan penguasaan tersebut, maka pimpinan perusahaan juga dipegang oleh tenaga yang didatangkan dari Jepang.

2.1.3. Perusahaan Listrik Zaman Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai sekarang

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami perjuangan fisik sampai tiba saatnya penyerahan kedaulan RI oleh pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan penguasaan kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia dikuasai oleh pemerintah RI, karena pada tahun tersebut dimulai nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Maka pada pada tanggal 17 Desember 1957 GEBEO diambil

alih oleh pemerintah Indonesia yang dikukuhkan dengan Peraturan No. 86 tahun 1958 jo PP No. 18 tahun 1959 tentang penentuan dibentuknya Perusahan Listrik dan gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan PP No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum PLN (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan wilayah kerja di seluruh Jawa Barat Kecuali DKI Jaya dan Tanggerang. Berdasarkan PP No. 18 tahun 1972 tentang Perusahan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas, dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan pemerintah, PLN Eksploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat. Dengan adanya PP No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994, tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahan Persero dengan nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak 30 Juni 1994 sesuai dengan akta pendirian.

Pada waktu Banten berubah menjai propinsi tersendiri PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat berubah namanya menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa barat & Banten membawahi 15 Area Pelayanan & Jaringan dan 1 Area Pelayanan Distribusi, yaitu :

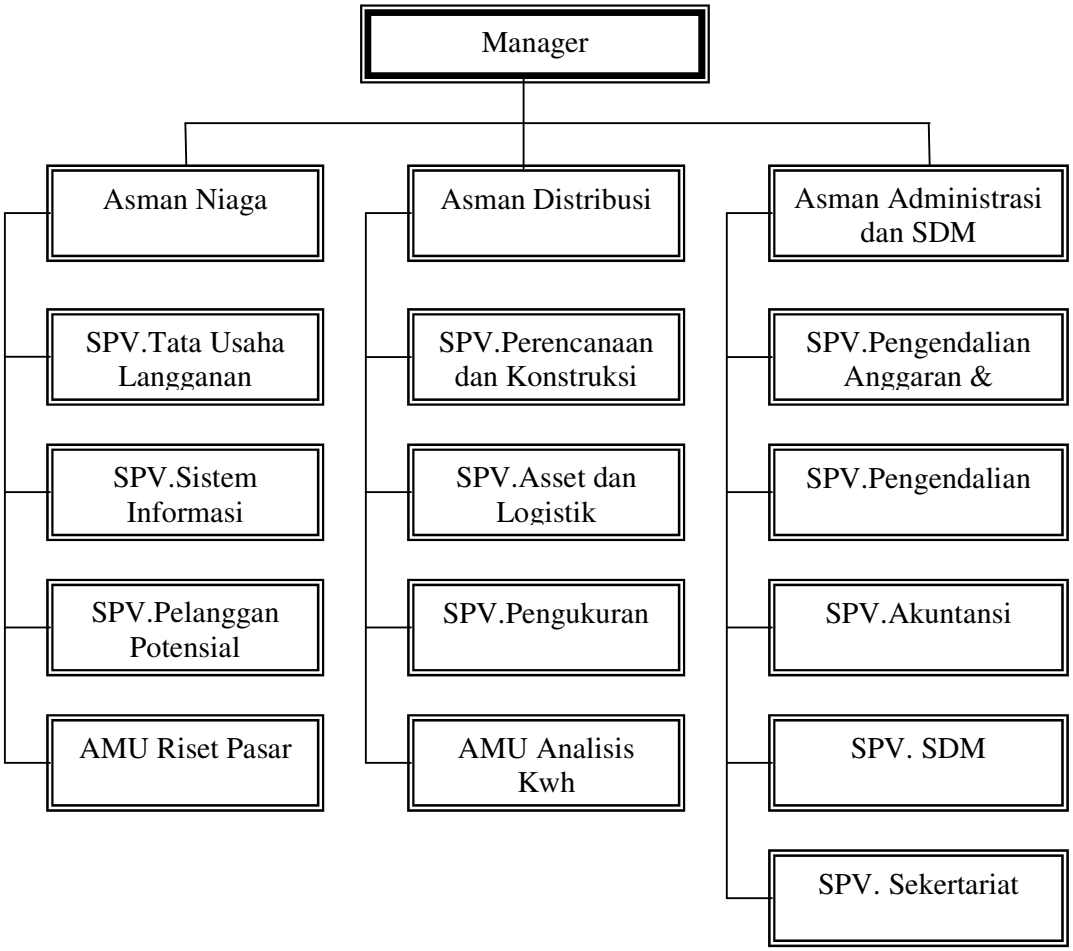
1. Area Pelayanan dan Jaringan Bandung
2. Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi
3. Area Pelayanan dan Jaringan Majalaya
4. Area Pelayanan dan Jaringan Garut
5. Area Pelayanan dan Jaringan Tasikmalaya

6. Area Pelayanan dan Jaringan Cirebon
7. Area Pelayanan dan Jaringan Purwakarta
8. Area Pelayanan dan Jaringan Bogor
9. Area Pelayanan dan Jaringan Sukabumi
10. Area Pelayanan dan Jaringan Cianjur
11. Area Pelayanan dan Jaringan Sumedang
12. Area Pelayanan dan Jaringan Karawang
13. Area Pelayanan dan Jaringan Depok
14. Area Pelayanan dan Jaringan Bekasi
15. Area Pelayanan dan Jaringan Banten
16. Area Pelayanan Distribusi Bandung (APD)

2.1.5. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Oganisasi Pt. PLN (Persero) distribusi Jawa Barat Dan Banten

Area Pelayanan dan Jaringan Bandung



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Uraian Fungsi Organisasi

1. **Manager Area**

- Kinerja perusahaan
- Citra Perusahaan
- Good Cooperate Government (GCG)
- Hubungan kerja dan komunikasi yang efektif
- Pembinaan dan pengembangan SDM
- Pembinaan kepada UP,UJ dan UPJ
- Audit UP,UJ da UPJ

2. **Asman Niaga**

- Regulasi dan mekanisme layanan
- Kinerja Niaga (retail)
- Fasilitas dan supervise reail kepada UP dan UPJ
- Bisnis proses da pedoman TUL
- Pengembangan usaha
- Metode segmentasi pasar
- Riset pasar
- Promosi dan komunikasi
- Monitoring tingkat mutu pelayanan (TNP)
- Administrasi / SPJBTL
- Pelaporan (kwh jual dan beli, PTL, Piutang)

3. Asman Distribusi

- Perencanaan dan pengembangan distribusi
- Kinerja distribusi (WIRE)
- Fasilitasi dan supervise wire kepada UP dan UPJ
- Analisa operasi dan pemeliharaan distribusi
- Analisa sudut Kwh
- Desain kontruksi
- Pengendalian persediaan material
- Aset manajemen
- Metering dan tera
- Monitoring tingkat mutu dan pelayanan (TMP)
- Administrasi teknik
- Pelaporan teknik (LTB, Neraca Kwh, 12RB)

4. Asman SDM & Keuangan

- Kinerja SDM dan keuangan
- Administrasi SDM
- Pengembangan SDM
- Secretariat dan umum
- Kehumasan
- Administrasi hokum
- PUKK
- K-3
- RKAP dan cash flow

- Pengendalian anggaran
- Administrasi keuangan
- Akuntansi
- Laporan keuangan

2.2. Produk Yang Dihasilkan

PT.PLN (persero) merupakan penyedia sistem ketenaglistrikan nasional. Produk yang dihasilkan adalah melayani masyarakat dalam menyediakan jasa pelayanan kebutuhan listrik.